



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MACHBUB DUMRON
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
3. NHK : 134188

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **649.867.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 385.680.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/38 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 129.691.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/48 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 134.496.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **820.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI ESTRELLA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
47.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 340.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI VULCAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
5. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000
6. MOTOR, KAWASAKI VERSYS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000



7. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
58.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 191.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 218.182.160

F. HARTA LAINNYA Rp. 61.200.000

Sub Total Rp. 1.940.249.160

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.940.249.160

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.